

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Strategi

##### 1. Pengertian Strategi

Dalam proses pembelajaran diperlukan suatu perhitungan tentang kondisi dan situasi, dimana proses tersebut berlangsung dalam jangka panjang. Dalam perhitungan tersebut, maka proses pengembangan kurikulum akan lebih terarah kepada tujuan yang hendak dicapai karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan secara matang.

Itulah sebabnya, lembaga pendidikan memerlukan strategi yang menyangkut pada masalah bagaimana mengembangkan kurikulum dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, dan juga bagaimana agar proses tersebut tidak terdapat hambatan serta gangguan baik internal maupun eksternal yang menyangkut kelembagaan maupun lingkungan sekitarnya.

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani “*Strategos*” (stratos = militer dan Ag = memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berfikir Strategik*. (Jakarta: Bina Aksara, 1996), h.19.

Pengertian strategi menurut Chandler dalam Husein Umar, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad strategi adalah tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.<sup>2</sup>

Strategi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam berbagai konteks dengan makna yang tidak selalu sama. Dalam kamusnya Peter Salim dan Yenny Salim mengartikan bahwa strategi adalah rencana cermat tentang suatu kegiatan guna meraih suatu target atau sasaran.<sup>3</sup>

Dalam pandangan penulis, strategi merupakan perencanaan tindakan untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi selalu berbicara tentang bagaimana “cara” yang dapat dilakukan untuk mencapai “finish” tertentu.

---

<sup>2</sup> Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategi* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 16.

<sup>3</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Nodem English Press, 1991), Edisi ke-1, h. 1463.

Sedangkan pengertian strategi secara umum dapat didefinisikan sebagai garis besar haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.<sup>4</sup> Dalam strategi pendidikan inilah segala perencanaan program sampai dengan pelaksanaannya dirumuskan sehingga *out put* yang diharapkan akan benar-benar sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu sistem pengelolaan yang baik, efektif dan efisien merupakan persyaratan mutlak yang perlu diwujudkan.

Persaingan lembaga pendidikan saat ini sudah mulai tajam dan secara tidak langsung memperkuat posisi konsumen untuk melakukan tawar menawar. Jika sebelumnya pimpinan perusahaan lebih cenderung memperhatikan proses produksi maka pada tahap ini mereka memusatkan pemasaraan yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan konsumen dengan memperhitungkan para pesaing.<sup>5</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan yang dimaksud strategi adalah suatu cara atau taktik yang digunakan untuk mencapai suatu sasaran yang efektif dan efisien, dengan melakukan suatu tindakan atau suatu usaha yang telah ditentukan melalui suatu perencanaan.

Jadi, strategi pengembangan kurikulum adalah cara *mendesign* tindakan serta menyusun konsep yang dilakukan dalam merencanakan,

---

<sup>4</sup> A. Tabrani Rusyan, dkk, Pendekatan dalam proses belajar mengajar, (bandung: CV remaja Rosdakarya, 1984), cet. Ke-1, h.165

<sup>5</sup> Akdon, *Strategik Manajement For Educational Manajement*...h. 75.

mengimplementasikan, dan mengevaluasi serta menyempurnakan kurikulum untuk mencapai tujuan tertentu.

Langkah formulasi strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk mengelola secara efektif kesempatan dan ancaman dari luar yang dihadapi organisasi. Langkah menyangkut penentuan misi organisasi atau perusahaan, penentuan obyektif yang terjangkau, pengembangan strategi dan pembuatan petunjuk kebijakan perusahaan. Langkah-langkah formulasi strategi sebagai berikut:

1. Penentuan Misi

Dalam suatu lembaga pendidikan, selalu ada visi dan misi. Keduanya sangat berbeda dan sering dikacaukan. Misi adalah tujuan atau penyebab mengapa suatu lembaga didirikan. Rumusan misi yang baik akan menggambarkan secara jelas tujuan dasar dan unik perusahaan yang membedakan dari perusahaan yang lain.

2. Penentuan Obyektif

Obyektif adalah suatu aktifitas yang diharapkan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Obyektif harus merupakan hasil yang sesuai dengan misi perusahaan. Obyektif adalah hal yang direncanakan dicapai dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu. Obyektif haruslah berjangka panjang dan mengenai hal hidup dan matinya berkembang atau tidaknya suatu organisasi.

3. Pengembangan strategi

Strategi adalah suatu rencana komprehensif bagaimana perusahaan melaksanakan misinya dan mencapai obyektifnya. Rencana tentu dapat bermacam-macam, meskipun untuk tujuan yang sama. Strategi haruslah untuk rencana jangka Panjang, umumnya untuk 5 tahun atau lebih. Strategi dalam hal ini adalah rencana dalam garis besar, bukan program kecil.

#### 4. Pembuatan Kebijakan

Menindaklanjuti pengembangan strategi, pembuatan kebijakan adalah langkah menyiapkan kebijakan umum yang diperlukan untuk melaksanakan strategi yang dimaksud. Kebijakan diharapkan akan menghubungkan formulasi strategi dengan implementasi strategi. Atas dasar kebijakan, semua menejer perusahaan dapat mempersiapkan implementasi strategi.<sup>6</sup>

##### a. Rencana Strategi

Perencanaan strategi adalah bagian dari manajemen strategi. Kata strategi berarti adanya rencana sebagai tindakan adaptif atau penyesuaian terhadap tuntutan atau masalah atau perubahan yang ada di lingkungan lembaga atau organisasi, sehingga lembaga melakukan tindakan adaptif terhadap tuntutan perubahan tersebut agar tetap hidup dan berkembang.<sup>7</sup>

Konsep perencanaan strategi yang berhasil didasarkan pada 4 asumsi dasar (artinya bila itu dipenuhi, maka strategi akan berhasil secara efektif dan efisien).

---

<sup>6</sup> Richardus Ekoindrajit, Manajemen Perguruan Tinggi Modern, (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 72.

<sup>7</sup> Stefanus suupriyanto, Perencanaan dan evaluasi , (Surabaya: Airlangga university press, 2007), h. 26.

1. Pemahaman akan visi, misi, tujuan yang dilanjutkan menjadi strategi.
2. Pemahaman akan perubahan dan tuntutan lingkungan eksternal lembaga/organisasi (peluang dan ancaman/tantangan).
3. Pemahaman kemampuan sumber daya internal organisasi yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, finansial, teknologi (kekuatan dan kelemahan kemampuan organisasi) dan asumsi-asumsi yang mendasari.
4. Penguasaan manajemen yang efektif yang meliputi kemampuan organisasi dalam perumusan strategi, perencanaan strategi, penyusunan program, anggaran, implementasi dan pengendalian yang efektif. Disamping keempat tersebut masih diperlukan yang namanya budaya organisai (nilai, norma, komitmen organisasi, kepemimpinan, kewirausahaan).<sup>8</sup>

Ada beberapa sistematika langkah perencanaan. Sistematika perencanaan disusun sebagai proses sendiri atau perencanaan sebagai bagian proses menejemen. Tahap atau prosedur langkah harus mengikuti alur yang sistematik artinya harus mengikuti urutan tertentu. Model secara umum yang dibuat dalam perencanaan strategi adalah meliputi proses perumusan rencana (analisis situasi, penentuan prioritas, perencanaan strategi, perencanaan operasional) dan proses pelaksanaan rencana sampai evaluasi atau penilaian.

---

<sup>8</sup> Geogre terry, prinsip-prinsip manajemen, tri J smith DFM...h. 19.

Proses ini berkesinambungan mengikuti dimensi waktu yang berbentuk spiral. Dinamis artinya setiap saat bisa direvisi atau dirubah sesuai dengan perubahan tuntutan lingkungan.<sup>9</sup>

#### **b. Rencana Strategi Pengembangan**

Ada beberapa asumsi yang mendasari perencanaan pengembangan kurikulum pondok pesantren maupun lembaga pendidikan yaitu:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan pendidikan yang berkualitas semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan kehidupan masyarakat yang semakin terbuka.
2. Untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dituntut ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang menunjang bagi kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan juga kualitas pengajar dari guru itu sendiri. Dengan demikian kurikulum harus direncanakan secara komprehensif.
3. Suatu perencanaan kurikulum yang komprehensif akan berurusan kepada sub-sub sistem kurikulum yang ada di lembaga pendidikan tersebut.<sup>10</sup>
4. Untuk mengimplementasikan rencana strategi pengembangan membutuhkan suatu penyusunan program. Penyusunan program mengadakan aktivitas yang nyata dan jelas untuk menentukan

---

<sup>9</sup> Stefanus supriyanto, perencanaan dan evaluasi...h. 31.

<sup>10</sup> Akdon, stategik manajemen for educational manajemen...h. 62.

setiap jenis rencana atau menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang nyata. Oleh karena itu program perlu dibuat dalam jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (2-3 tahun), jangka panjang (5 tahun atau lebih). Program jangka panjang adalah program untuk menyelesaikan strategi yang dibuat untuk jangka panjang. Sedangkan program jangka menengah dan pendek adalah program jangka untuk menjembatani dan menunjang pelaksanaan program jangka panjang.<sup>11</sup>

Senada dengan pendapat Stafanus perencanaan ditinjau dari segi cakrawala waktu yang dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Perencanaan jangka pendek

Perencanaan disini melihat pada sasaran yang lebih mudah diwujudkan, karena proyeksi ekonomis yang diadakan untuk menghitung sasaran jangka pendek lebih dapat dipercaya kebenarannya. Hal ini dapat dimengerti karena faktor ketidakpastiaan masih dapat ditekan sampai batas yang paling rendah. Oleh sebab itu perencanaan ini sering disebut sebagai perencanaan kegiatan-kegiatan operasional, karena rencana tadi dapat langsung dilaksanakan. Rencana tahunan, tengah tahunan, dan rencana anggaran dapat dikatakan sebagai rencana jangka pendek. Perencanaan jangka pendek adalah strategi *Cash Flow* atau sapi perah dimana keuntungan jangka pendek dapat dicapai.

---

<sup>11</sup> Eko indrajit, manajemen perguruan tinggi modern, (Yogyakarta, andi offset, 2006).



## 2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah diperuntukan perencanaan program. Perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang yang nantinya akan dijabarkan lebih terperinci pada perencanaan jangka pendek.

## 3. Perencanaan jangka Panjang

Merupakan perencanaan strategi organisasi yang akan menjadi acuan dan pedoman perencanaan jangka menengah dan pendek. Hasil perencanaan jangka panjang disebut dengan rencana strategi atau renstra.<sup>12</sup>

### **c. Implementasi Rencana**

Pelaksanaan rencana memiliki posisi yang sangat strategi dalam implementasi rencana, sebab bagaimapun idealnya program atau rencana yang akan diimplementasikan apabila salah dalam memilih pelaksana atau pelaksananya tidak memiliki kemampuan dan kecakapan sebagaimana yang diharapkan, maka niscaya semua program atau rencana itu tidak dapat mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Pelaksanaan rencana haruslah dipilih secara efektif dan efisien. Disini sebagai manager harus memiliki kemampuan untuk melakukan seleksi terhadap siapa yang akan melakukan atau melaksanakan rencana.

---

<sup>12</sup> Stefanus supriyanto, perencanaan dan evaluasi. h. 23.

Dalam rangka memberikan pendidikan yang bermutu bagi bangsa ini, maka perencanaan pendidikan termasuk perencanaan kurikulum harus baik dan berkualitas. Tuntutan masyarakat akan pelayanan pendidikan yang berkualitas semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan kehidupan masyarakat yang semakin terbuka. Untuk memberi pelayanan yang berkualitas dituntut kesediaan sekolah agar perencanaan kurikulumnya harus baik.<sup>13</sup>

## **B. Pengembangan Kurikulum**

### **1. Pengertian Pengembangan Kurikulum**

Pengertian pengembangan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.<sup>14</sup> Sedangkan pengertian pengembangan kurikulum adalah proses atau cara dalam mengembangkan kurikulum.

Pada dasarnya pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, kurikulum yang ada sekarang sangatlah berpengaruh terhadap tujuan pendidikan, untuk menyiapkan peserta

---

<sup>13</sup> Akdon, *strategik manajemen for educational manajement*. H 266-267.

<sup>14</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002) Edisi ke-3, h.1121.

<sup>15</sup> Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Cet. Ke-1 h. 84.

didik meraih masa depan yang lebih baik. Dalam pengembangan kurikulum banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum mengambil suatu keputusan. Pembuatan keputusan yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum merupakan proses kebijakan yang didalamnya terdapat tanggung jawab berbagai pihak yang berkepentingan dengan permasalahan pendidikan secara legal. Kadangkala ditemukan sikap pro dan kontra, yakni sikap menerima dan menolak terhadap hasil keputusan kurikulum. Hal ini mungkin dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang mereka terhadap hasil keputusan kurikulum dan fungsi sekolah.

Apabila pengembangan kurikulum yang dilakukan meliputi semua komponen, maka boleh jadi akan melahirkan satu kurikulum baru atau kurikulum yang lebih sempurna atau baik. Akan tetapi manakala pengembangan itu bersifat penyempurna atau untuk melengkapi kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum melalui interelasi adalah merupakan pengembangan kurikulum dari segi komponen materi antara mata pelajaran, pengembangan ini bisa juga akan menghasilkan metode atau proses belajar mengajar yang baru, semua ini baru dapat diketahui manakala upaya pengembangan tersebut sudah dapat dilakukan dan di implementasikan.

Sedangkan pengembangan kurikulum adalah suatu kegiatan yang menghasilkan kurikulum, ataupun proses yang mengaitkan satu

komponen dengan komponen lainnya untuk menghasilkan suatu kurikulum yang lebih baik, atau kegiatan penyusunan implementasi dan evaluasi perbaikan dan penyempurnaan kurikulum.<sup>16</sup>

Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar-mengajar, antara lain penepatan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya, untuk memudahkan proses belajar mengajar.<sup>17</sup>

## **2. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum**

Mengutip Sukmadinata, Hanun dan Anas mengungkapkan ada lima prinsip umum dalam pengembangan kurikulum, yaitu:<sup>18</sup> Prinsip Relevansi, prinsip yang berorientasi pada keserasian atau saling saling keterkaitannya komponen yang membentuk kurikulum. Sehingga hasil belajar atau kompetensi yang diperoleh akan berguna dalam artian relevan dengan kehidupan seseorang khususnya dan umumnya bagi kebutuhan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Muhammad, Zaini, *Pengembangan Kurikulum (Konsep Implementasi dan Inovasi)*, (Yogyakarta: Teras; 2009) h. 6.

<sup>17</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, PT Remaja Rosda Karya Bandung: 2009, h. 183.

<sup>18</sup> Ashrohah dan Anas Alamsyah, *Pengembangan Kurikulum*, h.65.

Menurut pendapat Oemar Hamalik, pengembangan kurikulum berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.<sup>19</sup>

a. Prinsip berorientasi pada tujuan

Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional.

b. Prinsip relevansi (kesesuaian)

Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi dan sistem penyampaian harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Prinsip efisiensi dan efektivitas

Kurikulum harus mempertimbangkan segi efisiensi dalam penyediaan dana, waktu, tenaga dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Demikianlah juga keterbatasan fasilitas ruangan, peralatan dan sumber keterbacaan, harus digunakan secara tepat guna oleh siswa dalam rangka pembelajaran, demi untuk meningkatkan efektifitas atau keberhasilan.

d. Prinsip fleksibilitas (keluwesan)

Kurikulum yang luwes mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku.

---

<sup>19</sup> Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 30-32.

e. Prinsip berkesinambungan

Kurikulum disusun berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi dan bahan kajian disusun secara berurutan.

f. Prinsip keseimbangan

Penyusunan kurikulum supaya memperhatikan keseimbangan secara proposional dan fungsional antara berbagai program, sub-program, antara semua mata pelajaran dan antara aspek-aspek perilaku yang diinginkan.

g. Prinsip keterpaduan

Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik dilingkungan sekolah maupun pada tingkat intersektoral.

h. Prinsip mutu

Pendidikan mutu berarti pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan/media yang bermutu.

### **3. Landasan Pengembangan Kurikulum**

Landasan atau dasar dalam penyusunan kurikulum merupakan hal yang sangat penting untuk ditelaah ulang karena kurikulum menempati kedudukan yang cukup sentral dalam pendidikan. Tidak hanya bagi para penyusun tingkat pusat (makro), akan tetapi lebih utama lagi harus difahami sendiri oleh para pengembang kurikulum ditingkat masing-masing lembaga,

meliputi guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan (*supervisor*), dewan harian sekolah atau komite pendidikan serta pihak-pihak lain yang terkait (*stake holder*).

Sukmadinata mengemukakan empat landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) filosofis; (2) psikologis; (3) sosial budaya; dan (4) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>20</sup>

Secara harfiah filsafat berarti “cinta akan kebijakan” (*love of wisdom*).<sup>21</sup> Berfilsafat juga diartikan sebagai berfikir secara radikal, berfikir sampai ke akar masalah. Sukmadinata menegaskan filsafat dan ilmu saling melengkapi (komplementer), karena filsafat memberikan landasan dasar bagi ilmu, manusia membutuhkan keduanya untuk membantu memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya termasuk masalah-masalah pendidikan yang disebut filsafat pendidikan.

Asrori mengungkapkan landasan filosofis pendidikan di Indonesia mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang bersumber pada pandangan dan cara hidup manusia Indonesia, yakni Pancasila sehingga jadilah landasan filosofis Pancasila.

Kemudian Landasan Psikologis, sukmadinata mengemukakan bahwa minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum yaitu (1) psikologi perkembangan dan (2) psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang

---

<sup>20</sup> Nana Syaodih Sukmadianata, *Pengembangan Kurikulum : Teori Dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), H. 38-78.

<sup>21</sup> Ibid., h.39.

perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan dikaji tentang hakekat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan perkembangan individu. Sedangkan psikologi belajar merupakan ilmu mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakekat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar yang semampunya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum.

Adapun landasan sosial-budaya menjadi titik balik bahwa setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial-budaya yang berbeda, sistem sosial-budaya masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial-budaya adalah tatanan nilai-nilai yang berisi peraturan, hukum juga moral yang bersumber dari agama, budaya, kehidupan politik maupun dari segi kehidupan lainnya. Oleh karena itu meskipun konsep pendidikan bersifat universal, namun pelaksanaannya tetap bersifat lokal dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Selanjutnya landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara langsung berimplikasi terhadap perkembangan kurikulum yang di dalamnya mencangkup perkembangan isi/materi pendidikan, penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan



masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan.

#### **4. Model-Model Pengembangan Kurikulum**

Kegiatan pengembangan kurikulum perlu ditempuh melalui Langkah-langkah tertentu secara sistematis sehingga dapat dihasilkan kurikulum yang baik. Oleh karenanya kegiatan pengembangan kurikulum memerlukan sesuatu model yang dapat dijadikan landasan teoretis untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam pengembangan kurikulum, model merupakan ulasan teoretis tentang proses pengembangan kurikulum.<sup>22</sup> Dengan perkataan lain, model pengembangan kurikulum merupakan teori-teori tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum.

Ada banyak model pengembangan kurikulum yang telah dikemukakan oleh para ahli yang berkecimpung di balam bidang pendidikan khususnya bidang kurikulum. Dalam uraian berikut akan dikemukakan di antara model-model tersebut yang dianggap cukup berpengaruh pada praktik penyusunan kurikulum hingga dewasa ini.

Untuk menguatkan lagi dalam pengembangan kurikulum ada beberapa model yang dapat digunakan, model pada dasarnya berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu ke dalam realitas yang sifatnya lebih praktis, yaitu sebagai berikut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.222.

<sup>23</sup> Dinn Wahyudin, *Op, Cit.*, h. 49.

## 1. Model Tyler

### a) Menentukan tujuan

Dalam Menyusun suatu kurikulum, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama dan utama yang harus dikerjakan, hal ini disebabkan karena tujuan merupakan arah atau sasaran pendidikan, hendak dibawa kemana anak didik, dan kemampuan apa yang harus dimiliki anak didik setelah mengikuti program pendidikan, semuanya bermuara kepada tujuan.

### b) Menentukan pengalaman belajar.

Pengalaman belajar adalah segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pengalaman belajar bukanlah isi atau materi pelajaran dan bukan aktivitas guru memberikan pelajaran. Pengalaman belajar menunjuk kepada aktivitas siswa di dalam proses pembelajaran. Dengan demikian memudahkan bagi guru untuk mendesain lingkungan yang dapat mengaktifkan siswa memperoleh pengalaman belajar.

### c) Mengorganisasikan pengalaman belajar

Langkah ketiga dalam merancang kurikulum adalah mengorganisasikan pengalaman belajar, baik dalam bentuk unit mata pelajaran, maupun dalam bentuk program. Sebab dengan pengorganisasian yang jelas akan memberikan arah bagi pelaksanaan proses pembelajaran sehingga menjadi pengalaman belajar yang nyata.

## 2. The Administrative Model

Model pengembangan kurikulum ini merupakan model yang paling lama dan paling banyak di kenal. Istilah lain dari model ini ialah *top-down* atau *line-staff*, karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Yaitu adanya tim-tim khusus pengarah pengembangan kurikulum yang terdiri atas pejabat di bawahnya, para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan. Tugas tim tersebut ialah merumuskan konsep-konsep dasar, landasan-landasan, kebijakan, dan strategi utama dalam pengembangan kurikulum.

Setelah hal-hal yang mendasar itu terumuskan dan mendapatkan pengkajian yang seksama, kemudian administrator pendidikan menyusun tim atau komisi pengembangan kurikulum yang terdiri atas para ahli pendidikan/kurikulum, ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi, guru-guru bidang studi yang senior. Tim tersebut bertugas menyusun kurikulum yang sesungguhnya yang lebih operasional, dijabarkan dari konsep-konsep dan kebijakan dasar yang telah digariskan oleh tim pengarah. Setelah tugas tersebut selesai, maka hasilnya dikaji ulang oleh tim pengarah serta para ahli yang berwenang atau pejabat yang kompeten. Dan setelah mendapatkan beberapa penyempurnaan, dan nilai-nilai cukup baik,

administrator pemberi tugas menetapkan berlakunya kurikulum tersebut serta memerintahkan pada sekolah-sekolah untuk melaksanakan kurikulum tersebut.<sup>24</sup>

### 3. Beauchamp's Sistem

Beauchamp merupakan salah seorang ahli di bidang kurikulum. Beauchamp mengemukakan lima hal di dalam pengembangan kurikulum:

*Pertama*, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, apakah suatu sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun seluruh negara. Pentahapan arena ini ditentukan oleh wewenang yang dimiliki oleh pengambil kebijaksanaan dalam pengembangan kurikulum, serta oleh tujuan pengembangan kurikulum.

*Kedua*, menetapkan personalia, yaitu siapa saja yang turut terlibat dalam pengembangan kurikulum. *Ketiga*, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi, dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum.

*Keempat*, implementasi kurikulum. Dalam mengimplementasi kurikulum membutuhkan kesiapan yang

---

<sup>24</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum*, h.161.

menyeluruh, baik kesiapan guru-guru, siswa, fasilitas, bahan maupun biaya, disamping kesiapan manajerial dari pimpinan sekolah atau administrator setempat, dan *kelima* yaitu evaluasi.

Minimal ada empat hal yang menjadi sasaran evaluasi:

1. Evaluasi pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru
2. Evaluasi desain kurikulum
3. Evaluasi hasil belajar siswa
4. Evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum.

## **5. Hambatan-hambatan Pengembangan Kurikulum**

Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Hambatan pertama terletak pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal ini disebabkan beberapa hal. *Pertama* kurang waktu. *Kedua* kekurangsesuaian pendapat, baik antara sesama guru maupun kepala sekolah dan administrator. *Ketiga* kemampuan dan pengetahuan guru sendiri.<sup>25</sup>

Hambatan lain datang dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan.<sup>26</sup> Hambatan yang dihadapi oleh pengembang kurikulum adalah masalah biaya.<sup>27</sup> Untuk pengembangan

---

<sup>25</sup> Nana Saodih Sukmadinata, Op. Cit., h.160.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 161

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 162

kurikulum, apalagi yang berbentuk eksperimen baik metode, isi atau sistem secara keseluruhan membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit.

## **C. Madrasah Diniyah**

### **1. Pengertian Madrasah Diniyah**

Kata Madrasah berasal dari kata *darasa* (belajar) yang mempunyai “*isim makan*” *madrasah* yang berarti tempat belajar atau sekolah.<sup>28</sup> Sedangkan diniyah berasal dari kata *diin* (agama) yang mendapat akhiran *ya’nisbah* yang mempunyai arti hal-hal yang berhubungan dengan agama. Jadi secara bahasa madrasah diniyah dapat diartikan sebagai sekolah atau tempat belajar yang memberikan pelajaran-pelajaran agama.

Menurut Zuhairini, madrasah diniyyah sebagai sekolah yang khusus memberikan pendidikan dan pengajaran agama islam.<sup>29</sup> Sedangkan menurut departemen agama, madrasah diniyah adalah salah satu lembaga keagamaan yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama kepada anak didik yang belum terpenuhi melalui jalur sekolah.<sup>30</sup>

Madrasah diniyah adalah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama islam kepada anak didik yang tidak

---

<sup>28</sup> Ahmad Warson, Kmaus Al-Munawwir Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka progresif, 1997), h.398.

<sup>29</sup> Zuhairini,dkk...,*Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 217.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliyah*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam, 1996).

terpenuhi pada jalur sekolah yang diperoleh memulai sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan.<sup>31</sup>

Berdasarkan sistem pendidikan nasional, madrasah diniyah termasuk dalam kategori pendidikan keagamaan. Sedangkan pendidikan keagamaan menurut Undang-undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 adalah:

Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan untuk kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agamanya dan atau menjadi ahli agama.<sup>32</sup> Madrasah diniyah adalah madrasah yang seluruh mata pelajarannya bermaterikan ilmu-ilmu agama, yaitu fiqih, tafsir, tauhid, hikmah tasri', dan ilmu-ilmu agama lainnya. Dengan materi ilmu agama yang demikian padat dan lengkap, maka memungkinkan para santri yang belajar didalamnya lebih baik penguasaannya terhadap ilmu agama.

Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama islam kepada pelajar Bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 orang atau lebih, diantaranya anak-anak yang berusia 7 (tahun) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.<sup>33</sup>

Madrasah diniyah merupakan bagian dari sistem pendidikan formal pesantren. Madrasah diniyah ini menjadi pendukung yang melengkapi kekurangan yang ada dalam sistem pendidikan formal pesantren, sehingga antara pendidikan pesantren dengan pendidikan diniyah saling terkait. Posisi madrasah diniyah adalah sebagai lembaga penambah dan pelengkap

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI. *Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah* (Jakarta:Departemen Agama RI, 2000), h.7.

<sup>32</sup> Ibid, h.277.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *pedoman*, h. 23.

dari sekolah formal hanya sekitar 2 jam dirasa belum cukup untuk menyiapkan keberagaman anaknya sampai ke tingkat yang memadai untuk mengarungi kehidupan kelak.

Jadi inti dasar madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang utuh, yang didalamnya diajarkan mengenai perihal dan seluk beluk agama islam, dan tidak diajarkan perihal umum. Dan sistem pengajarannya adalah secara klasikal.

## 2. Tujuan dan Fungsi Madrasah Diniyah

Tujuan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Keberadaan Madrasah Diniyah pondok pesantren merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan di pondok pesantren, dengan demikian tujuannya sama dengan tujuan umum pendidikan dipondok pesantren yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguasai ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) dan mampu melahirkan insan-insan yang mutafaqqih *fi al-din*. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali



kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. Al-Taubah: 122).<sup>34</sup>

- 2) Menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan tekun, ikhlas semata-mata beribadah kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS. Al-Bayyinah:5) :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar) (QS. Al-Bayyinah: 5).<sup>35</sup>

Adapun fungsi madrasah diniyah secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Membina perkembangan kepribadian anak
- 2) Memberikan tuntunan dan pembinaan kesejahteraan anak yang diperlukan pada masa mudanya
- 3) Memberikan pendidikan keagamaan pada anak agar diamalkan bagi diri anak dan dicontohkan kepada orang lain

<sup>34</sup> Al-Qur'an Terjemahan DEPAG RI, (Semarang : CV Toha Putra, 2002), h. 206.

<sup>35</sup> Al-Qur'an Terjemahan., 598.

- 4) Membantu rumah tangga/keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya
- 5) Membantu meningkatkan dan memajukan keluarga dan masyarakat
- 6) Membantu dalam peningkatan pendidikan agama pada sekolah umum
- 7) Memberi pendidikan dan tuntunan kepada anak dalam kependudukan dan lingkungan hidup.<sup>36</sup>

### 3. Kurikulum Madrasah Diniyah

Para ahli mendefinisikan secara beragam Muhaimin merangkumnya dalam tiga kategorisasi. Pertama, kurikulum menekankan pada isi pelajaran. Kedua, kurikulum yang menekankan pada proses atau pengalaman belajar. Ketiga, sintesis dari keduanya.<sup>37</sup> Perbedaan fokus penekanan dalam definisi kurikulum menunjukkan perkembangan kajian kurikulum. Paradigma baru dalam pendidikan manefsirkan kurikulum secara lebih luas sebagai keseluruhan elemen yang fokus pada penyelesaian aktifitas dan pengalaman yang dilaksanakan oleh guru dan murid baik secara

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Standarisasi Pengajaran Agama di Pondok Pesantren*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembangan Agama Islam, 1983/1984), h. 15.

<sup>37</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, 1th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 2-5.

formal maupun informal untuk mencapai tujuan pendidikan.<sup>38</sup> Lebih lanjut Toto menjelaskan bahwa dalam paradigma ini kurikulum mencakup program dan produk pendidikan sebagai hasil dan pengalaman belajar murid yang diharapkan.<sup>39</sup> Formulasi dan perbaikannya mengacu pada empat prinsip yaitu, asas filosofis, psikologis, sosiologis dan organisatoris.<sup>40</sup>

Pengembangan kurikulum berlaku di semua tingkat pendidikan, termasuk di madrasah diniyah. Karena madrasah diniyah juga merupakan salah satu bagian dari subsistem pendidikan nasional. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan pengakuan jelas tentang pendidikan keagamaan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Bentuknya dapat berupa pendidikan diniyah, pesantren dan sejenisnya dapat diselenggarakan melalui berbagai jalur (formal, nonformal, dan informal).<sup>41</sup>

Sebagai bagian dari pendidikan nasional, madrasah telah berkembang lama dan mengalami dinamika yang berbeda dengan di negara lain. Abuddin Nata menguraikan klarifikasi umum madrasah dalam dua bentuk. Pertama, madrasah sebagai sekolah umum yang

---

<sup>38</sup> Toto Suharto, "Transnational Islamic Education in Indonesia: An Ideological Perspective," *Contemporary Islam* 12, no.2 (July 2018): 101-22, <https://doi.org/10.1007/z11562-017-0409-3>.

<sup>39</sup> Suharto.

<sup>40</sup> S Nasution, *Asas-asas Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 11-14.

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

berciri khas agama yang terdiri dari madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah Aliyah. Madrasah tersebut mayoritas berstatus negeri, dan selainnya swasta. Kedua, madrasah diniyah yang kurikulumnya terdiri dari *mata* pelajaran agama yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, Fiqih/Ushul Fiqih, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.<sup>42</sup>

Penjelasan mengenai kurikulum madrasah tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa madrasah diniyah memiliki kurikulum minimal yang mencakup beberapa mata pelajaran keagamaan, antara lain Al-Qur'an, Al-Hadits, Fiqih, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.<sup>43</sup>

Penjelasan ini memberikan pemahaman bahwa pengembangan kurikulum di madrasah diniyah sangat mungkin dilakukan karena madrasah diniyah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional dan pengembangan kurikulum yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal madrasah diniyah. Karena setiap madrasah mempunyai karakter dan ciri khas tersendiri, terutama madrasah diniyah yang berbasis pondok pesantren.

---

<sup>42</sup> Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.201.

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Madrasah diniyah dalam pengembangan kurikulum sepenuhnya mengikuti kebijakan dari kyai yang melibatkan guru-guru dan pihak lain dari masyarakat yang memiliki kepedulian lebih terhadap pengembangan kurikulum. Realitas menunjukkan saat ini madrasah diniyah telah berkembang secara bervariasi baik dilihat dari segi isi (kurikulum) dan bentuk/manajemen/struktur organisasinya.

Pengembangan kurikulum dapat mencakup seluruh komponen kurikulum atau hanya sebagai komponen kurikulum saja.<sup>44</sup> Penyusunan hanya dapat dilakukan oleh seorang dan ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan atau program satuan

pendidikan dan sesuai dengan satuan kondisi pendidikan dan masyarakat sekitarnya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Herry Widyastono, *Op, Cit.*, h. 50.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 51

